

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar pegawai negeri sipil di kota-kota besar seperti Surabaya banyak mengalami permasalahan menjelang masa pensiun baik masalah mental, ekonomi maupun secara sosial. Permasalahan tersebut muncul karena kebanyakan para pegawai negeri sipil belum menyiapkan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada saat masa pensiun. Rumke dalam Sadli (1991) dan Ekoningtyas (2010) menyatakan bahwa usia 55-65 termasuk dalam batas usia pensiun (BUP) dan seseorang yang telah memasuki batas usia pensiun pada saat itu seseorang akan sedikit demi sedikit kehilangan pekerjaan, peran sosial di masyarakat, kekuasaan, fasilitas, dan materi.

Turner dan Helms (1991) dalam Hakim (2007) menjelaskan bahwa pensiun sebagai suatu akhir dari tugas suatu pekerjaan formal dan awal dari suatu peran baru dalam kehidupan, diantaranya berupa harapan perilaku selanjutnya dan bagaimana mendefinisikan ulang (*redefini*) tentang diri (*self*).

Hal ini senada dengan pernyataan Kuntjoro (2002) dalam Isnawati dan Suhardi (2013) yang menyatakan bahwa pada saat pensiun ada tiga hal yang hilang dalam kehidupan pegawai pertama, hilangnya kegiatan rutin yang dilakukan sejak kerja sampai pulang kerja; kedua kehilangan teman kerja; ketiga seseorang akan kehilangan sebagian pendapatan dan status yang disandang.

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh catatan bidang sosial PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam Isnawati dan Suhardi (2013) memaparkan 15% dari

jumlah karyawan yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) pada tahun 2011 sering keluar masuk rumah sakit sejak menjalani MPP dan 2% dari jumlah karyawan yang memasuki MPP meninggal dunia sebelum periode MPP habis dijalankan selama enam bulan. Selain itu ada juga salah satu karyawan yang sedang berada pada awal masa persiapan pensiun di PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam tiga bulan pertama mengalami beberapa permasalahan seperti mengurung diri di kamar, tidak mengikuti kegiatan di lingkungan rumah, dan jarang menyapa tetangga.

Namun tidak semua pegawai negeri sipil mengalami permasalahan yang sama seperti permasalahan yang terjadi pada beberapa karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur yang sedang menjalani masa persiapan pensiun. Ada juga pegawai negeri sipil yang menanggapi santai status pensiun yang akan didapatkannya karena telah memiliki perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan sebelum memasuki masa pensiun. Hal tersebut senada dengan pernyataan Hakim (2007) yang menyatakan pensiun oleh beberapa pekerja dapat dianggap sebagai suatu masa yang dinanti-nantikan, tetapi juga ada yang menganggap sebagai suatu masa yang mencemaskan, sehingga tidak tahu apa yang akan dilakukannya kelak apabila dirinya pensiun. Beberapa hal yang menyebabkan kecemasannya datang diantaranya adalah belum tahu apa yang akan dikerjakannya di rumah, penghasilan yang diterimanya akan menurun dari penghasilannya saat ini, kesempatan bertemu dengan teman-teman kerjanya sudah seperti terputus, bagi yang mempunyai jabatan sudah tidak akan menerima

perlakuan istimewa lagi (seperti berbagai fasilitas yang dirasakannya saat masih bekerja), dan lain-lainnya.

Kesiapan para pegawai negeri sipil dalam menghadapi masa pensiun bergantung pada persepsi pegawai negeri sipil mengenai pensiun itu sendiri bagi kehidupan mereka. Maka dari itu untuk mengurangi permasalahan-permasalahan menjelang dan pasca pensiun pemerintah telah menyediakan program masa persiapan pensiun atau yang lebih sering dikenal dengan singkatan MPP bagi pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah menyatakan bahwa bagi pegawai negeri sipil, sebelum menghadapi pensiun, ada hak yang diberikan kepadanya, antara lain masa persiapan pensiun (MPP), yaitu cuti panjang selama satu tahun yang dapat diberikan kepada seorang pegawai negeri, baik PNS, ABRI maupun POLRI yang akan memasuki usia pensiun. MPP merupakan kesempatan yang baik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian, pelatihan-pelatihan yang diberikan dengan kebijakan instansi masing-masing dengan harapan kegiatan pelatihan ini akan menambah wawasan keahlian dan nantinya dapat mengganti penghasilan yang akan hilang ketika saatnya pensiun tiba (www.pdii.lipi.go.id, dikases 9 April 2014).

Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa masa persiapan pensiun adalah keadaan dimana ketika seorang PNS akan mempersiapkan masa sebelum purna tugas selama satu tahun. Pada masa ini pegawai negeri sipil yang sudah memasuki BUP (Batas Usia Pensiun) diberikan kesempatan untuk memilih

mengambil atau tidak mengambil MPP (Masa Persiapan Pensiun) selama satu tahun. Apabila, PNS dimaksud mengambil MPP-nya maka hak-hak kepegawaiannya adalah : (1) bagi staf hak kepegawaiannya tidak hilang atau tidak berubah; (2) bagi pejabat hak kepegawaian dasarnya tidak hilang atau tidak berubah, namun yang hilang adalah tunjangan jabatan dan fungsionalnya (www.bkn.go.id, diakses 9 April 2014).

Berikut ini peneliti akan menyajikan data tentang aktivitas dan wacana usaha pegawai golongan II dan golongan III yang akan memasuki masa pensiun sebelum dan sesudah diberi sosialisasi mengenai masa persiapan pensiun.

Tabel 1.1.1

Aktivitas dan Wacana Usaha pada Masa Pensiun Sebelum diberi Sosialisasi mengenai Masa Persiapan Pensiun

NO.	ASPEK YANG DIUNGKAP	KLP-I	KLP-II	JUMLAH
1	Menikmati lebih dahulu masa pensiun	11,39%	25,32%	36,71%
2	Berkunjung kerumah kerabat, anak-cucu	8,86%	11,39%	20,25%
3	Memulai/merintis usaha baru	7,60%	18,98%	26,58%
4	Meneruskan/menekuni usaha yang dimiliki	7,60%	8,86%	16,46%
JUMLAH		35,44%	64,56%	100%

Keterangan :

KLP-I adalah pegawai dari golongan II dan KLP-II adalah pegawai dari golongan III

Sumber: Hakim, Nurina Siti. 2007. Perencanaan dan Persiapan Menghadapi Masa Pensiun. Jurnal WARTA, Vol.10, No.1, Hal. : 96-109.

Berdasarkan data yang ada pada tabel 1.1.1 dapat diketahui bahwa aktivitas dan wacana usaha pegawai negeri sipil sebelum diberi sosialisasi mengenai program MPP, baik dari golongan II maupun golongan III lebih banyak

ingin mengisi aktivitas pensiunnya dengan menikmati terlebih dahulu masa pensiun.

Tabel 1.1.2

Aktivitas dan Wacana Usaha pada Masa Pensiun Setelah diberi Sosialisasi mengenai Masa Persiapan Pensiun

NO.	ASPEK YANG DIUNGKAP	KLP-I	KLP-II	JUMLAH
1	Menikmati lebih dahulu masa pensiun	3,70%	6,67%	10,37%
2	Berkunjung kerumah kerabat, anak-cucu	18,52%	22,96%	41,48%
3	Memulai/merintis usaha baru	13,33%	17,04%	30,37%
4	Meneruskan/menekuni usaha yang dimiliki	6,67%	11,11%	17,78%
JUMLAH		42,22%	57,78%	100%

Keterangan :

KLP-I adalah pegawai dari golongan II dan KLP-II adalah pegawai dari golongan III

Sumber: Hakim, Nurina Siti. 2007. Perencanaan dan Persiapan Menghadapi Masa Pensiun. Jurnal WARTA, Vol.10, No.1, Hal. : 96-109.

Berdasarkan data yang ada pada tabel 1.1.1 dan tabel 1.1.2 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan aktivitas dan wacana usaha pegawai golongan II dan golongan III yang akan memasuki masa pensiun sebelum dan sesudah diberi sosialisasi mengenai masa persiapan pensiun. Pada pegawai golongan II dan pegawai golongan III sebelum disosialisasi mengenai MPP aktivitas dan wacana usaha pegawai lebih banyak ingin diisi dengan aktivitas menikmati masa pensiun dan berkunjung kerumah kerabat, anak serta cucu, namun setelah disosialisasi mengenai MPP para pegawai mulai tertarik merintis usaha baru untuk mengisi kegiatan pada saat masa pensiun. Hal tersebut membuktikan bahwa program masa persiapan pensiun sangat diperlukan para pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun, karena selain untuk memudahkan pegawai negeri sipil

untuk beradaptasi dengan kegiatan kantor yang mulai berkurang pegawai negeri sipil juga bisa merencanakan kegiatan-kegiatan baru untuk menggantikan kegiatan yang selama ini dilakukan saat bekerja dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan saat masa pensiun.

Seperti yang dikatakan Mathews, dkk. (1982) dalam Hakim (2007) tanpa ada suatu perencanaan dan persiapan, pensiun dapat menimbulkan suatu kondisi yang penuh tekanan atau stress.

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan pada tahun 2010 oleh Deassy Ekoningtyas. Ekoningtyas (2010) membuktikan bahwa stres akan mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan yang akan menjelang pensiun di PT. Krakatau Steel Cilegon, karena sebagian karyawan yang mendekati masa pensiun mengalami stres dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya, baik lingkungan kerja maupun lingkungan di luar pekerjaan. Maka dari itu sebelum pensiun sebaiknya karyawan menyusun perencanaan untuk menghadapi pensiun, karena perencanaan tersebut bisa menjadi motivasi bagi karyawan untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya serta meningkatkan kinerja di tempat kerja karyawan tersebut (Ekoningtyas, 2010).

Pada tahun 2013 Dian Isnawati dan Fendy Suhariadi membuktikan bahwa dukungan sosial dari perusahaan dan keluarga berhubungan dengan penyesuaian diri masa persiapan pensiun pada karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Hasil penelitian Isnawati dan Suhariadi (2013) menunjukkan arah hubungan yang positif, artinya ketika semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan oleh

perusahaan dan keluarga maka semakin tinggi pula kemampuan karyawan untuk menyesuaikan diri menjelang masa pensiun, dan begitu pula sebaliknya semakin rendah dukungan sosial yang diberikan oleh perusahaan dan keluarga maka semakin rendah pula kemampuan karyawan untuk menyesuaikan diri menjelang masa pensiun.

Pada tahun 2014 Danar Lesmana membuktikan bahwa ada hubungan antara kecerdasan spritual dengan kecemasan menghadapi pensiun. Hasil penelitian Lesmana (2014) menunjukkan arah hubungan yang negatif, artinya PNS akan memiliki tingkat kecemasan menghadapi pensiun yang rendah ketika memiliki tingkat kecerdasan spritual yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya PNS akan memiliki tingkat kecemasan menghadapi pensiun yang tinggi ketika memiliki tingkat kecerdasan spritual yang rendah.

Penelitian ini ingin menelaah bagaimana pegawai negeri sipil Universitas Airlangga khususnya pegawai negeri sipil non dosen memaknai pensiun, serta kegiatan apa saja yang dilakukan menjelang pensiun. Mengingat Universitas Airlangga adalah salah satu universitas negeri yang sebagian besar karyawannya adalah pegawai negeri sipil, serta sebagian besar pegawai negeri sipil di Universitas Airlangga tidak mengambil masa persiapan yang telah di sediakan oleh pemerintah dan pihak universitas ketika akan memasuki masa pensiun.

Berikut ini peneliti akan menyajikan data jumlah pensiunan pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen pada tahun 2010 hingga tahun 2013 beserta data pegawai negeri sipil Univiersitas Airlangga non dosen yang

mengambil program masa persiapan pensiun pada tahun sebelum pegawai negeri sipil tersebut memasuki masa pensiun.

Tabel 1.1.3

Jumlah Pensiunan PNS Universitas Airlangga Non Dosen serta Jumlah PNS yang Mengambil dan tidak Mengambil MPP

No	Tahun Pensiun	Jumlah PNS Non Dosen yang Pensiun	Jumlah PNS Non Dosen yang Mengambil MPP	Jumlah PNS Non Dosen yang tidak Mengambil MPP
1	2010	54 orang	7,4%	92,6%
2	2011	45 orang	4,4%	95,6%
3	2012	63 orang	3,2%	96,8%
4	2013	55 orang	7,3%	92,7%

Sumber : Data Kepegawaian Universitas Airlangga.

Berdasarkan tabel 1.1.3 dapat diketahui bahwa jumlah pegawai negeri sipil non dosen Universitas Airlangga yang pensiun pada tahun 2010-2013 berkisar antara 40 sampai dengan 60 orang, namun dari banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun tersebut ternyata hanya 3% sampai dengan 7% saja yang berminat mengambil program MPP atau rata-ratanya pertahun hanya 5,5% saja yang berminat untuk mengambil program MPP.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena dapat diketahui sejauh mana kesiapan pegawai negeri sipil non dosen di Universitas Airlangga dalam menghadapi masa pensiun yang bisa dilihat dari pemaknaan terhadap pensiun dan kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan oleh pegawai negeri sipil non dosen Universitas Airlangga menjelang masa pensiun.

1.2 Fokus Penelitian

Berkaitan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang berisi bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia

pensiun, yaitu: 1). 58 tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional (www.setkab.go.id, diakses 9 April 2014).

Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 berarti saat ini masa kerja pegawai negeri sipil menjadi bertambah dua tahun sebelum pensiun, maka dari itu persiapan menjelang pensiun pegawai negeri sipil tentulah akan lebih panjang bagi pegawai yang seharusnya tahun 2014 ini memasuki masa pensiun dan dari tabel 1.1.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai negeri sipil non dosen di Universitas Airlangga tidak mengambil program MPP. Dari uraian tersebut fokus penelitian yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen memaknai pensiun?
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen menjelang masa pensiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menjawab fokus penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemaknaan pensiun menurut pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen.
2. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen menjelang masa pensiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi inspirasi kepada peneliti lain untuk memperdalam kajian ini.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam sosiologi, khususnya mata kuliah sosiologi ekonomi, tenaga kerja dan mobilitas serta masalah ketenaga kerjaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan pada Badan Kepegawaian Negara dan Instansi-instansi yang memiliki program MPP agar membuat program MPP lebih variatif lagi sehingga para pegawai bisa menyiapkan masa pensiunnya dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan pada saat masa persiapan pensiun maupun saat masa pensiun.

1.5 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Teori Interaksionisme Simbolik

Teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpikir yang dihasilkan melalui interaksi sosial dengan individu lain, dimana dalam interaksi sosial tersebut manusia dengan kemampuan berpikirnya

menginterpretasi simbol-simbol yang diperoleh ketika berinteraksi. Dengan menginterpretasikan simbol-simbol itulah manusia bisa melakukan suatu tindakan baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri terkait dengan simbol-simbol tersebut. Manusia dapat mengubah pemaknaan terhadap simbol-simbol yang biasa mereka gunakan bergantung pada situasi yang mereka hadapi, bukan hanya itu manusia juga mampu membuat keputusan dan melakukan perubahan dengan membuat pilihan-pilihan dalam bertindak dengan menilai untung dan ruginya bagi mereka serta kemudian memilih salah satu dari pilihan-pilihan yang telah mereka buat. Hal tersebut dikarenakan manusia selain bisa berinteraksi dengan individu lain juga mampu berinteraksi dengan dirinya sendiri. Menurut Ritzer dan Goodman (2012:289) pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan tersebut akan membentuk suatu kelompok dan masyarakat.

Teori interaksionisme simbolik melihat realitas sosial sebagai suatu proses, artinya realitas sosial bukan sebagai fakta yang sudah ada melainkan hasil dari interaksi individu, dimana individu tersebut kemudian menginterpretasikan realitas yang dilihatnya secara subyektif. Dalam teori ini manusia adalah aktor yang bebas bukan merupakan hasil dari produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi yang bersifat obyektif. Interaksionisme simbolik tidak melihat tindakan yang dilakukan aktor sebagai suatu respon langsung terhadap realitas sosial, namun lebih menekankan pada bagaimana realitas yang bersifat obyektif diinterpretasikan secara subyektif oleh aktor.

Seperti yang telah dibahas diawal Mead menjelaskan orang tidak hanya menyadari keberadaan orang lain tetapi juga menyadari keberadaan dirinya

sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri. Bahasa merupakan simbol terpenting dalam interaksionisme simbolik melalui isyarat. Simbol-simbol tersebut juga bukan merupakan realitas sosial yang sudah ada melainkan diperoleh melalui interaksi sosial. Proses penyampaian makna dan interaksi para aktor merupakan subyek utama dalam analisa kaum interaksionis-simbolis (Paloma, 2004:257).

Sedangkan bagi Blumer (1969:2) interaksionisme-simbolis bertumpu pada tiga premis ;

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung (Paloma, 2004:258).

Suatu obyek tidak ada yang inheren sehingga selalu memunculkan makna bagi manusia. Pemaknaan yang dilakukan oleh manusia tersebut merupakan hasil dari interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang biasanya dianggap cukup berarti. Seperti yang telah dijelaskan diawal semua obyek yang ditemui oleh aktor tidak secara langsung direspon oleh aktor melainkan bergantung pada bagaimana pemaknaan aktor terkait dengan obyek tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan Blumer (1969:4), “bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu.

Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain” (Paloma, 2004:259).

Manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang kemudian menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer (1969:81) sebagai proses *self-indication*. *Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks sosial dimana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu, yang bagi Blumer tindakan tersebut lebih dari hanya sekedar performa tunggal (Paloma, 2004:261).

Bagi Blumer keistimewaan pendekatan kaum interaksionisme simbolik ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka bukan hanya saling berinteraksi kepada setiap tindakan itu menurut mode stimulus-respon. Seseorang tidak langsung memberi respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan kepada tindakan itu (Paloma, 2004:263).

Menurut Paloma (2004:264-265) pemikiran interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Blumer memiliki beberapa asumsi dasar, antara lain:

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi, dimana kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama yang kemudian membentuk apa yang dikenal sebagai *organisasi* atau *struktur sosial*.

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain.
3. Obyek-obyek tidak mempunyai makna intrinsik dan makna merupakan produk dari interaksi-simbolis.
4. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

Menurut Blumer (1969:15) pada dasarnya tindakan terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan saran yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran tentang diri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu (Paloma, 2004:265).

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok.

Pada paparan teori interkasionisme simbolik tersebut berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti yaitu pemaknaan pensiun dan kegiatan pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen menjelang masa pensiun dimana pegawai negeri sipil yang akan menjelang masa pensiun sebagai aktornya mempelajari simbol baru yang akan didapatkannya, lalu kemudian menilai dan memaknai simbol-simbol baru yang dipelajarinya tersebut. Pemaknaan terhadap

simbol baru tersebut memungkinkan pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan seperti melakukan kegiatan menjelang masa pensiun. Simbol baru yang dimaksudkan disini adalah perubahan status yang akan dialami oleh pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun, yakni dari status sebagai pegawai negeri sipil yang sebelumnya masih aktif bekerja menjadi pensiunan pegawai negeri sipil.

1.6 Batasan Konsep

1.6.1 Pemaknaan

Pemaknaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penafsiran individu terhadap simbol-simbol yang merupakan hasil interaksi dengan individu lain, dimana dengan penafsiran simbol tersebut dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan baik bagi dirinya sendiri maupun melakukan tindakan untuk individu lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemaknaan pensiun bagi pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen terkait dengan status baru yang akan di dapatnya yakni sebagai seorang pensiunan, dimana hasil dari pemaknaan tersebut akan mempengaruhi tindakan pegawai negeri dalam melakukan kegiatan menjelang masa pensiun.

1.6.2 Kegiatan

Kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen yang ditujukan untuk mempersiapkan masa pensiun, bahkan aktivitas-aktivitas tersebut juga ditujukan untuk mengisi sebagian

besar waktunya setelah memasuki masa pensiun khususnya aktivitas-aktivitas untuk mencari sumber penghasilan tambahan yang ditujukan untuk menambah penghasilan yang berkurang ketika pensiun nanti, mengingat kebutuhan hidup yang semakin bertambah setiap tahunnya.

1.6.3 Pegawai Negeri Sipil

Ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 mengenai perubahan UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu:

1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (www.elib.unikom.ac.id, diakses 8 Mei 2014).

Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun yang dimaksud pegawai negeri sipil dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil non dosen berusia 56 tahun yang bekerja di Universitas Airlangga Surabaya yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2016. Ditambah dengan

berlakunya transisi peruturan pensiun pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014 bagi pegawai negeri sipil yang masih ingin melaksanakan tugas mohon untuk membuat surat pernyataan kesanggupan ingin melaksanakan tugas sampai usia 58 tahun tetapi bagi pegawai negeri sipil yang tidak bersedia melaksanakan tugas mohon menulis surat pensiun maka mereka dianggap BUP (Batas Usia Pensiun). Maka dari itu alasan peneliti menggunakan informan utama pegawai negeri sipil non dosen yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2016 karena peneliti berpikir bahwa pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2016 masih aktif bekerja karena masa kerja mereka ditambah dua tahun dan pegawai negeri sipil tersebut tentunya masih sering melakukan interaksi dengan individu yang lain sehingga bisa mempengaruhi pemikirannya terkait pemaknaan mengenai pensiun serta merencanakan kegiatan yang hendak dilakukan pada saat masa pensiun.

1.6.4 Masa Persiapan Pensiun

Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa masa persiapan pensiun adalah keadaan dimana ketika seorang PNS akan mempersiapkan masa sebelum purna tugas selama satu tahun. Pada masa ini BUP (Batas Usia Pensiun) yakni pegawai yang sudah berusia 56 tahun diberikan kesempatan untuk memilih mengambil atau tidak mengambil MPP (Masa Persiapan Pensiun) selama 1 Tahun. Apabila, PNS dimaksud mengambil MPP-nya maka hak-hak kepegawaiannya adalah : (1) bagi staf hak kepegawaiannya tidak hilang atau tidak berubah; (2) bagi pejabat hak kepegawaian dasarnya tidak hilang atau tidak berubah, namun yang hilang adalah tunjangan jabatan dan fungsionalnya

(www.bkn.go.id, diakses 9 April 2014). Namun saat ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, batas usia pensiun pegawai negeri sipil menjadi 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat tinggi.

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kegiatan pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen menjelang masa pensiun yakni metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2007:145) permasalahan penelitian belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dikumpulkan dengan metode lain dan peneliti bertujuan untuk memahami situasi sosial secara mendalam (Prastowo, 2011:178).

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Arikunto (2003:310) metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala atau keadaan seperti mendeskripsikan dan menginterpretasikan jawaban-jawaban dari informan yang berkaitan dengan pemaknaan pensiun dan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan masa pensiun (Prastowo, 2011:186).

1.7.1 Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif memandang realitas sebagai bentukan dari interaksi manusia yang penuh makna (*meaningfull social action*). Dengan demikian realitas itu adalah pemaknaan (*meaning*) dimana hanya bisa ditafsirkan

dan hendak dilukiskan secara mendalam (*thick description*). Pandangan ini bersesuaian dengan filsafat rasionalis yang memandang bahwa individu (manusia) dengan rasionalitasnya mampu menemukan kebenaran. Bahkan kebenaran itu sendiri sudah ada di dalam diri manusia itu, karenanya tidak dicari di luar dirinya. Karena dasar ilmu pengetahuan kemudian berasal dari rasionalitas manusia atau pemaknaan (*meaning*) tadi maka ilmu pengetahuan itu tidak bersifat objektif dan tidak pula universal. Ilmu pengetahuan semata menggambarkan kekhasan pengalaman suatu kelompok manusia dalam konteks tertentu (www.communicator12.blogspot.com, diakses 9 April 2014).

Melalui paradigma interpretatif dalam memaknai pensiun, informan terkonstruksi oleh apa yang ada dalam dirinya dan pikiran orang lain. Sehingga dapat terlihat bahwa setiap informan memiliki pengalaman dan padangan yang berbeda dalam memaknai masa pensiun pada saat sebagai pegawai negeri sipil serta dalam melakukan kegiatan menjelang masa pensiun.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Natason fenomenologi adalah istilah untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memaknai tindakan sosial (Kuswarno, www.nurudin.staff.umm.ac.id, diakses 9 April 2014).

Menurut Moleong fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh peneliti. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Peneliti berusaha untuk

masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh peneliti disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (www.nurudin.staff.umm.ac.id, diakses 9 April 2014).

1.7.3 Penentuan Informan Penelitian

Sugiyono (2010:50) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif ini berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya bukan untuk menggeneralisasi melainkan diteransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan pada situasi sosial pada kasus yang diselidiki (Prastowo, 2011:195).

Dalam menentukan informan penelitian peneliti menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiyono (2007:52) purposive merupakan teknik penentuan informan yang didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang permasalahan penelitian tersebut (Prastowo, 2011:197).

Alasan peneliti untuk menggunakan purposive dalam menentukan informan karena peneliti beranggapan bahwa purposive memang cocok digunakan sebagai teknik penentuan informan yang peneliti gunakan dengan melihat kepemilikan data yang dimiliki peneliti. Selain itu diharapkan kriteria informan yang peneliti butuhkan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini terdapat delapan informan yang menjadi subyek penelitian, yang terdiri dari enam informan utama dan dua informan pendukung.

Adapun kriteria informan utama yang menjadi subyek dalam penelitian ini, yakni: (1) pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen yang akan memasuki pensiun pada tahun 2016; (2) berusia 56 tahun; (3) laki-laki dan perempuan; (4) tingkat jabatan mulai dari golongan II hingga golongan IV. Mengingat Universitas Airlangga terdiri dari delapan fakultas eksakta dan lima fakultas non eksakta, namun pada tahun 2014 ini tidak semua fakultas memiliki pegawai yang akan memasuki masa pensiun, maka peneliti mengambil beberapa fakultas dimana jumlah pegawai negerinya yang akan memasuki masa pensiun paling banyak. Hal tersebut tidak untuk keterwakilan informan baik dari fakultas eksakta maupun non eksakta, namun peneliti ingin melihat variasi data dari informan. Adapun variasi informan utama dalam penelitian ini yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diambil sebanyak tiga orang, terdiri dari PNS golongan IVA, IIID dan IIA; Fakultas Kedokteran Hewan diambil sebanyak dua orang, terdiri dari PNS golongan IIIB dan IIA; Fakultas Vokasi diambil sebanyak satu orang, terdiri dari PNS golongan IIID.

Sedangkan untuk kriteria informan pendukung dalam penelitian ini adalah salah satu anggota keluarga baik istri maupun suami dari pegawai negeri sipil Universitas Airlangga non dosen yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2016. Alasan peneliti memilih informan pendukung salah satu anggota keluarga dari informan utama dikarenakan istri maupun suami adalah orang yang paling dekat dengan informan utama dan secara tidak langsung juga ikut merasakan dampak dari perubahan yang akan terjadi menjelang maupun setelah informan utama memasuki masa pensiun. Adapun variasi informan pendukung dalam

penelitian yaitu dua orang istri dari informan utama. Kedua informan tersebut sama-sama ibu rumah tangga, dan sama-sama istri dari PNS dengan golongan kepangkatan IIA, namun salah satu informan memiliki penghasilan tambahan dengan berdagang dan satu informan lainnya tidak bekerja sama sekali.

1.7.4 Setting Sosial

Setting sosial dalam penelitian ini adalah Universitas Airlangga Surabaya. Alasan peneliti memilih Universitas Airlangga sebagai lokasi penelitian karena peneliti menjumpai fenomena dimana sebagai besar pegawai negeri sipil yang ada di Universitas Airlangga tidak mengambil masa persiapan pensiun yang telah disediakan oleh pemerintah dan pihak universitas ketika akan memasuki masa pensiun. Peneliti merasa fenomena tersebut sangat menarik untuk diteliti mengingat banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan masa persiapan pensiun yang dialami pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat diketahui sejauh mana kesiapan pegawai negeri sipil non dosen di Universitas Airlangga dalam menghadapi masa pensiun.

1.7.5 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dari informan penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan berupa tanya jawab terkait dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Satori dan Komariah (2009:130) wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena peneliti ingin mengeksplorasi jawaban informan secara holistic dan jawaban yang lebih jelas dari informan.

Mc Milan dan Schumacher (2001:443) menjelaskan bahwa wawancara mendalam adalah tanya jawab terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati informan, tentang bagaimana menggambarkan dunia mereka dan bagaimana mereka menjelaskan atau menyatakan perasaannya tentang kejadian-kejadian penting dalam hidupnya (Satori dan Komariah, 2009:130).

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan berupa tanya jawab dengan informan terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu peneliti juga menggunakan handphone sebagai alat untuk merekam hasil wawancara guna memudahkan peneliti pada saat proses wawancara dan memudahkan peneliti untuk menyimpan hasil wawancara sebagai bukti telah melakukan wawancara.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua proses yakni proses pengolahan dan proses penafsiran. Menurut Prastowo (2011: 238) proses pengolahan terdiri dalam tiga tahap, yakni:

1. Proses editing

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilah foto, dan catatan-catatan lainnya.

2. Proses klasifikasi

Pada tahap ini peneliti menggolongkan jawaban-jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya.

3. Proses memberi kode

Pada tahap ini peneliti melakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan.

Dan tahap yang terakhir dalam melakukan analisis data adalah proses penafsiran dimana pada tahap ini data yang sudah diberi kode kemudian diberi penafsiran. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi melalui analisis komparasi (perbandingan) sepanjang tidak menghilangkan konteks aslinya. Hasilnya adalah pemaparan gambar tentang situasi dan gejala dalam bentuk pemaparan naratif. Peneliti juga harus menjaga agar data penelitian supaya tetap objektif dan diupayakan pula tidak muncul penafsiran subjektif. Dengan demikian, apa yang peneliti temukan pada data adalah konsep-konsep, hukum, dan teori yang dibangun dan dikembangkan dari data lapangan, bukan dari teori yang sudah ada.